

## DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Zulfalailia

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

[zulfalailia27@gmail.com](mailto:zulfalailia27@gmail.com)

Faridah

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

[faridahcute\\_iryani@yahoo.com](mailto:faridahcute_iryani@yahoo.com)

Anggeraini Oktarida

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

[anggeraini\\_oktarida@polsri.ac.id](mailto:anggeraini_oktarida@polsri.ac.id)

---

### Informasi Artikel

Tanggal Masuk:  
30 Agustus 2024

Tanggal Revisi:  
16 Oktober 2024

Tanggal Diterima:  
31 Oktober 2024

Publikasi On line:  
14 Nopember 2024

### Abstract

*The financial performance of regional governments in the regency/city of South Sumatra Province is the focus of this study, which seeks to identify the partial and simultaneous influences of regional original income, balancing funds, capital expenditures, and prosperity levels. This study makes use of secondary data derived from the Regency/City Budget Realisation Report for South Sumatra Province for the fiscal year 2018–2022, which is a part of the Regional Government Financial Report (LKPD). This study use multiple linear regression and the classical assumption test for its analysis. Research shows that (1) Original Regional Income significantly affects the financial performance of regional governments in a good way. (2) When it comes to the budgetary performance of regional governments, Balancing Funds are a major factor. (3) The financial performance of regional governments is unaffected by capital expenditures. (4) The fiscal health of municipalities is positively correlated with the degree of prosperity. There is a strong and substantial relationship between the level of prosperity, regional original income, balancing funds, capital expenditures, and regional government financial performance.*

**Key Words:** Regional Government Financial Performance

### Abstrak

Kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan menjadi fokus studi ini, yang berupaya mengidentifikasi pengaruh parsial dan simultan dari PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kesejahteraan. Studi ini memakai data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018–2022 yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Studi ini memakai regresi linier berganda dan uji asumsi klasik untuk analisisnya. Hasil penelitian menandakan yaitu (1) PAD berdampak signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan baik. Dalam kaitannya dengan kinerja anggaran pemerintah daerah, Dana Perimbangan merupakan faktor utama. (3) Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh belanja modal. (4) Kesehatan keuangan kabupaten/kota berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan. Terdapat hubungan yang kuat dan substansial antara tingkat kesejahteraan, PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

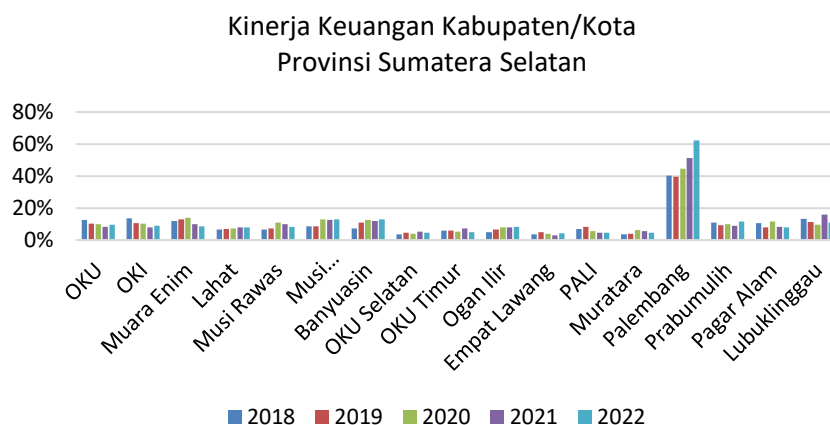
**Key Words:** Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

---

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kewenangan dan tugas daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya. Langkah awal dalam urusan pemerintahan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian, dan evaluasi. Artinya, untuk mengukur keberhasilan inisiatif pembangunan, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi daerah. Perihal ini dapat terlihat dari kinerja pembangunan daerah dan pengelolaan keuangannya. Menurut Sains

(2018), tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh manajemen di bidang keuangan daerah disebut kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah mencakup penggunaan sistem keuangan untuk menentukan pendapatan dan belanja daerah dalam kerangka satu periode anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan.



Sumber: BPK RI (Data diolah, 2024)

**Gambar 1.1 Tingkat Kemandirian Daerah**

Gambar 1.1 tersebut menandakan rasio kemandirian keuangan daerah yang merupakan ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 di atas, hasil kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022 tidak konsisten. Saat 2018, otonomi tertinggi diraih oleh Kota Palembang, yakni hanya 40,12%. Di sisi lain, Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kabupaten yang paling bergantung pada kekuatan eksternal dengan perolehan suara hanya 3,47 persen. Tahun 2019 tingkat kemandirian tertinggi masih pada Kota Palembang yaitu 39,53% (menurun dari tahun sebelumnya sejumlah 0,59). Tingkat terendah tahun 2019 masih pada Kabupaten Musi Rawas Utara sejumlah 3,96% (mengalami kenaikan 0,49 dari tahun sebelumnya). Selanjutnya, tahun 2020 Kota Palembang memiliki tingkat kemandirian tertinggi sejumlah 44,49% (mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 4,96), tingkat terendah beralih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan senilai 3,77% (menurun dari tahun sebelumnya sejumlah 0,71). Tahun 2021, tingkat kemandirian tertinggi masih dimiliki oleh Kota Palembang sejumlah 51,39% (mengalami kenaikan 6,9). Tingkat kemandirian terendah adalah 2,90% yang dimiliki Kabupaten Empat Lawang. Tahun 2022 tingkat kemandirian tertinggi ada pada Kota Palembang sejumlah 62,19 (mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 10,8). Tingkat terendah saat ini kembali pada Kabupaten Empat Lawang 4,34% (mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 1,44). Tingkat otonomi keuangan daerah menentukan sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam mengelola dan melaksanakan anggaran. Karena memungkinkan pemerintah daerah untuk mendukung pemekaran dan mengurangi ketergantungan pada uang federal, PAD merupakan komponen kunci kemandirian daerah. PAD yang dihimpun sesuai dengan norma dan peraturan daerah bersumber dari sumber-sumber daerah yang sah seperti pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan demikian, kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan PAD akan memengaruhi kemajuan dan perkembangannya. Selain itu, seiring dengan meningkatnya PAD kontribusinya terhadap APBD, negara menjadi kurang bergantung pada bantuan federal. Penurunan penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan menandakan yaitu kinerja keuangan pemerintah provinsi juga menurun, karena dana transfer dari pemerintah federal dalam bentuk dana perimbangan akan meningkat jika penerimaan pendapatan daerah rendah. Peningkatan dana federal dapat mengurangi otonomi daerah dan merugikan hasil anggarannya. Sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh Putri dan Yuniarta (2023) menemukan yaitu PAD memiliki proporsionalitas terbalik dengan (Ratnasari dan Meirini, 2022). Temuan ini menandakan yaitu PAD tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi memiliki efek positif signifikan kepadanya. Sangat penting untuk memakai dana perimbangan dari pemerintah federal untuk mengatasi kesenjangan fiskal karena, kemampuan daerah dalam mengumpulkan dana berbeda-beda tergantung pada kondisi daerah. Beberapa penelitian menandakan yaitu dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Maulina, Alkamal, dan Fahira, 2021) serta pendapat yang sama bahwa dana perimbangan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Wahyudin dan Hastuti, 2020). Namun beberapa penelitian lainnya menandakan yaitu dana perimbangan memengaruhi yang negatif dan tidak signifikan (Niswani dan Firdaus, 2022), penelitian lainnya juga berpendapat bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Putri dan Yuniarta, 2023). Belanja modal yang lebih tinggi mengindikasikan yaitu pemerintah daerah melaksanakan investasi pada sarana dan prasarana masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan PAD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Digdowiseiso, Subiyanto, dan Cahyanto saat 2022 menemukan yaitu belanja modal memang memengaruhi yang positif bersignifikan secara statistik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi ini bertolak belakang dengan pernyataan Putri dan Yuniarta (2023) yang menyatakan yaitu belanja modal tidak memengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebab itu, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat kekayaan suatu daerah agar tercapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Aulia dan Rahmawaty (2020) menemukan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh kesejahteraan, namun Kusumawardani (2020) tidak menemukan pengaruh tersebut. Perlu dipertimbangkan apakah kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi secara parsial dan simultan oleh dana perimbangan, tingkat kesejahteraan, belanja modal, dan PAD, sebagaimana dijelaskan pada pernyataan sebelumnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi fokus studi ini, yang bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tentang hubungan antara pendapatan daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kesejahteraan. Ini juga akan membantu siapa pun yang ingin tahu tentang masalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

## TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS dan Hipotesis

### Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan hubungan antara principal yang memberikan tugas pada agent dalam pendelegasian suatu otoritas (Siagian, 2020). Teori keagenan awalan dikembangkan dari makalah tahun 1976 berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cosis, and Ownership Structure*" oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. William H. Meckling dan Michael C. Jensen mendefinisikan "Hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen". Pernyataan tersebut menyatakan yaitu teori keagenan adalah kerangka hukum di mana satu pihak (agen) membantu tindakan pihak lain (prinsipal) dan pihak lain (prinsipal) membuat perjanjian. Teori keagenan juga berguna di sektor publik. Istilah "keagenan" dipakai di sini untuk merujuk pada hubungan apa pun yang dibuat oleh kontrak antara beberapa pihak. Dalam organisasi sektor publik, masyarakat memainkan peran prinsipal dan pemerintah memainkan peran agen (Halim dan Abdullah, 2012:101).

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan menggambarkan suatu perolehan hasil atas penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan sistem keuangan berdasarkan peraturan selama satu periode anggaran (Sains, 2018). Kinerja keuangan menjadi salah satu ukuran agar bisa melihat kemampuan daerah dalam mengelola pemerintahannya (Halim, 2012:232). Kinerja juga dapat dilihat dari tingkat kemakmuran ekonomi di suatu daerah merupakan indikasi kemampuannya untuk mempertahankan kemandiriannya. Keberhasilan keuangan daerah dapat dinilai dengan beberapa cara, yaitu dengan memakai rasio keuangan yang diperoleh dari data keuangan daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio-rasio tersebut antara lain, efektivitas, efisiensi, kemandirian, keselarasan modal, dan pertumbuhan. Untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan keuangan daerah, kinerja keuangan daerah perlu diukur secara kuantitatif. Dalam kajian ini, rasio kemandirian dipakai untuk menilai pencapaian keuangan daerah.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pajak, retribusi, dan pembagian serta pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain yang sah (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah). PAD adalah jumlah uang yang diperoleh dari aset potensial suatu daerah yang diatur dalam peraturan daerah (Halim, 2012:96). PAD suatu daerah dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerjanya. Semakin tinggi PAD suatu daerah, berarti pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada di bawah kendalinya dengan baik.

**Dana Perimbangan**

Dana perimbangan dipakai untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana tersebut dihimpun dari pendapatan APBN dan didistribusikan ke daerah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Sebagai hasil dari strategi desentralisasi fiskal pemerintah federal, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal antara pemerintah federal dan daerah, maka dibentuklah dana perimbangan ini. Pada Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Komponen dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah federal dan satu sama lain.

**Belanja Modal**

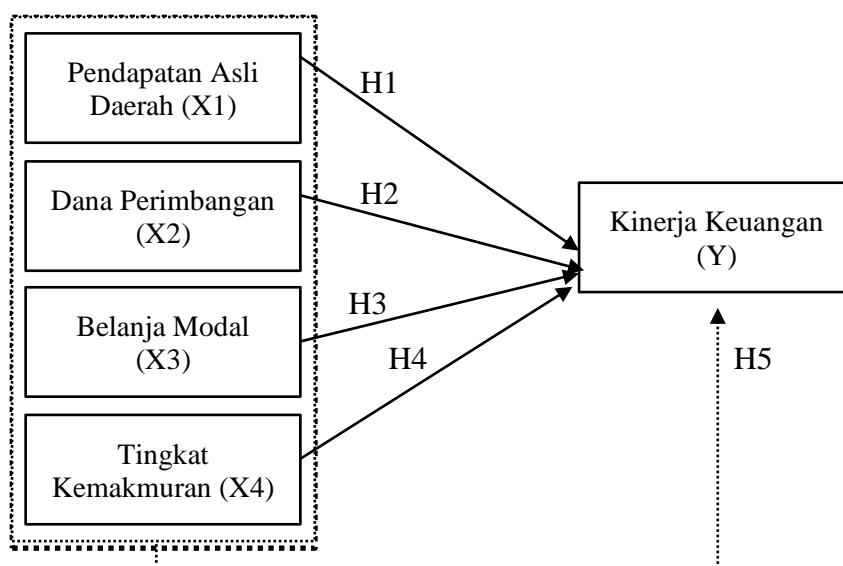
Menurut definisinya, belanja modal adalah perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat dalam berbagai periode akuntansi (Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk proyek tertentu agar bisa memberikan kemudahan hidup masyarakat dalam jangka panjang (Ayinde dkk, 2021). Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran moneter untuk perolehan aset, seperti aset tetap, yang memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah dimuat dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah No. 4. Aset pemerintah ditingkatkan dengan bersignifikan oleh aset tetap dan aset lainnya yang disebutkan di atas, yang sering kali memiliki nilai tinggi, masa manfaat lebih dari satu tahun, dan dampak nyata. Agar dianggap sebagai belanja modal, suatu biaya harus mencakup; a). Akuisisi aset tetap dan aset lainnya merupakan salah satu cara pengeluaran uang untuk meningkatkan aset lainnya. b). Pengeluaran yang melebihi kriteria modal minimum aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. c). Tidak ada rencana untuk menjual aset yang pernah dipertimbangkan saat membelinya.

**Tingkat Kemakmuran**

Kemakmuran menggambarkan suatu daerah dapat mengelola daerah nya dengan baik dan suatu kemakmuran dapat diukur melalui berbagai cara dan tidak selalu sama sebab akan berbeda dalam pandangan hidup (Kusumawardani, 2020). Karena berbagai individu memiliki pandangan dunia yang berbeda dan memakai metrik yang berbeda untuk mengevaluasi keberhasilan, tidak ada definisi kemakmuran nasional yang diterima secara universal. Kinerja pemerintah provinsi diukur berdasarkan nilai tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Indikator kemakmuran suatu pemerintah adalah laju kenaikan pendapatan daerah, yang menandakan seberapa baik pemerintah mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya dalam setiap siklus pengumpulan PAD (Sumarjo. 2010).

**Kerangka Konseptual**

Kerangka teori ini berupaya untuk memperjelas hubungan antara pendapatan daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kemakmuran sebagai faktor independen dan variable dependen, kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah landasan konseptual yang memandu studi ini:



Sumber: Data diolah, (2024)

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Keterangan:

- : Pengaruh Parsial  
.....→ : Pengaruh Simultan

### **Pengembangan Hipotesis**

Karena hanya berdasarkan spekulasi, hipotesis yang diajukan hanya merupakan hipotesis kerja pada tahap penyelesaian masalah studi ini.

#### **Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

PAD merupakan jumlah total uang yang diperoleh suatu daerah dari semua sumber yang sah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset mandiri, dan tambahan uang yang diizinkan oleh undang-undang. PAD memengaruhi yang besar dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Ahlillah, Sari, dan Oktarida (2022) serta Putri dan Yuniarta (2023). PAD sangat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Nauw dan Riharjo (2021). Namun, analisis yang dilaksanakan oleh Ratnasari dan Meirini saat 2022 menandakan yaitu PAD sama sekali tidak terkait dengan kelayakan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga terdapat pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Daerah memperoleh dana APBN sebagai "dana perimbangan" yang membantu memenuhi kebutuhan daerah dan mendorong desentralisasi. Untuk mencapai otonomi daerah yang sebagian besar dicapai melalui peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dana perimbangan disediakan agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya (Budianto dan Alexander, 2021). Penelitian menandakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif signifikan oleh pencapaian perimbangan keuangan (Maulina et al., 2021). Penelitian menandakan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif signifikan oleh perimbangan anggaran (Wahyudin, 2020). Namun berbeda dengan (Nauw dan Riharjo, 2021) karena dana perimbangan mempengaruhi kinerja anggaran pemerintah daerah. Pengaruh perimbangan keuangan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah kecil dan negatif, menurut penelitian (Niswani dan Firdaus, 2022). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Diduga terdapat pengaruh Dana Perimbangan kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Akuisisi aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat dalam berbagai periode akuntansi disebut belanja modal dalam UU No. 71 Tahun 2010. Suatu satuan kerja memakai aset tetap tersebut untuk keperluan operasionalnya yang normal; aset tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Penelitian menandakan yaitu belanja modal memengaruhi yang positif dan substansial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ratnasari dan Meirini, 2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan substansial oleh belanja modal, menurut penelitian (Niswani dan Firdaus, 2022). Belanja modal memiliki dampak yang kecil dan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, bertentangan dengan penelitian (Putri dan Yuniarta, 2023). Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

#### **Pengaruh Tingkat Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Ukuran keberhasilan daerah adalah jumlah uang asli yang diciptakan secara lokal. Semakin besar dampak PAD, semakin baik pelayanan publik dan semakin banyak kebutuhan di daerah tersebut terpenuhi. Salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat kemakmurannya, menurut penelitian (Aulia dan Rahmawaty, 2020). Penelitian oleh Christian Manoppo, Winerungan, dan Tanor (2023) dan Millenia (2022)

menandakan yaitu kekayaan memiliki efek yang menguntungkan pada keberhasilan finansial. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga terdapat pengaruh Tingkat Kemakmuran kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Tingkat Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kombinasi antara belanja modal, anggaran perimbangan, dan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Nauw dan Riharjo, 2021; Ardelia, Wulandari, Ernitawati, dan Dumadi, 2022). Sementara itu, menurut (Aulia dan Rahmawaty, 2020), pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik merupakan indikator bahwa PAD dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan prima. Penggalan sumber PAD yang optimal oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan derajat kesejahteraan yang ditandai dengan tingginya PAD. Berdasarkan hasil penelitian, belanja modal, anggaran perimbangan, PAD, dan tingkat kesejahteraan merupakan beberapa unsur yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

H5: Diduga terdapat pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Tingkat Kemandirian kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Studi ini mencakup tujuh belas kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ketika menyelidiki populasi yang besar, peneliti sering memakai metode pengambilan sampel karena menganalisis seluruh populasi akan menjadi tugas yang terlalu menakutkan. Ketika mengambil sampel, metode Pengambilan Sampel Nonprobabilitas, sering disebut Pengambilan Sampel Jenuh, dipakai. Pengambilan sampel jenuh adalah metode pengambilan sampel di mana semua populasi saat ini dipakai sebagai sampel. Selama lima tahun, peneliti dari tujuh belas kabupaten dan kota yang berbeda di Provinsi Sumatera Selatan mengumpulkan data dari delapan puluh lima partisipan. Penelitian data panel dipakai sebagai sumber data tambahan karena studi ini mengintegrasikan data cross-sectional dan time series dengan memakai metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif melihat populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data memakai instrumen penelitian, dan menganalisis data numerik dan statistik untuk mengevaluasi hipotesis (Sugiyono, 2020). Data yang dipakai dalam studi ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Sumatera Selatan untuk kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut dari 2018 hingga 2022. Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, data tersebut diperoleh dari situs resmi <https://e-ppid.bpk.go.id/>. Faktor independen dalam studi ini adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, dan tingkat kesejahteraan, sedangkan variable dependennya ialah kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada tabel 1.1 di bawah ini, variable-variable yang diukur dalam studi ini adalah:

**Tabel 1.1 Variable Penelitian dan Pengukuran**

No	Variable	Pengukuran	Skala	Sumber
1	PAD	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio	Marizka (2013)
2	Dana Perimbangan	$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$	Rasio	Marizka (2013)
3	Belanja Modal	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio	Tahar dan Suwandi (2015)
4	Tingkat Kemakmuran	$\frac{\text{PAD}(t) - \text{PAD}(t-1)}{\text{PAD}(t-1)} \times 100\%$	Rasio	Marizka (2013)
5	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	Rasio	Mahmudi (2016)

Sumber: Data diolah (2024)

Studi ini menganalisis data dengan memakai analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda, satu variable dependen diuji dalam kaitannya dengan beberapa faktor independen. Pemilihan model data panel dan uji asumsi klasik dilaksanakan dengan memakai program Econometric Views (EViews) 12 sebelum dilaksanakan analisis regresi linier berganda. Kami memakai salah satu dari tiga pendekatan— REM, FEM, atau CEM —untuk memilih model data panel. Kami akan menilai teknik-teknik ini memakai uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menemukan yang terbaik bagi penelitian kami. Selain itu, pengujian berikut ini dilaksanakan sebagai bagian dari uji asumsi konvensional: uji t, uji f, Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>), uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Studi ini memakai model-model berikut untuk regresi linier berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β<sub>1</sub> – β<sub>4</sub> = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = PAD

X<sub>2</sub> = Dana Perimbangan

X<sub>3</sub> = Belanja Modal

X<sub>4</sub> = Tingkat Kemakmuran

e = error

## HASIL PENELITIAN

### Pemilihan Regresi Data Panel

Uji Chow

Uji Chow membandingkan Model Efek Umum dengan Model Efek Tetap dengan melihat nilai probabilitas Chi-square. Ini membantu untuk mengetahui model mana yang lebih baik dan lebih tepat.

Tabel 4.1 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.225616	(16,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	133.445682	16	0.0000

Sumber: Data diolah, 2024

Statistik Chi-Square Cross-section adalah 133,445682, serta angka probabilitasnya ialah 0,0000, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Model Efek Tetap (FEM) dipilih untuk uji Chow ini karena, karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 (0,0000 < 0,05), H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

Uji Hausman

Uji Hausman dilaksanakan untuk membandingkan model mana yang terbaik dan paling tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* dengan melihat nilai *probability* dari *Cross-section random*.

Tabel 4.2 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	26.386743	4	0.0000

Sumber: Data diolah, 2024

Hasilnya ialah probabilitas 0,0000 dan Statistik Chi Square 26,386743, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. Hipotesis  $H_a$  diterima dan hipotesis nol  $H_0$  ditolak karena hasil probabilitas kurang dari 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), yang menandakan yaitu FEM dipilih untuk uji Hausman ini. Dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan, berkesimpulan yaitu:

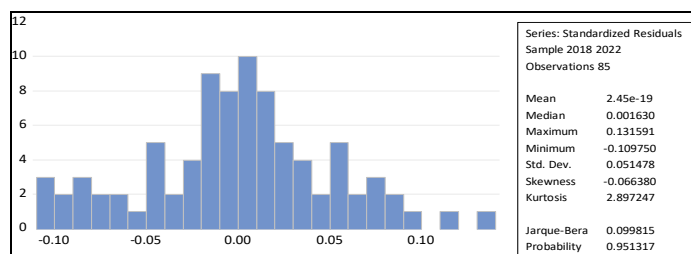
1. Pada uji *chow* model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.
2. Pada uji *hausman* model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Chow dan Hausman dipilih untuk memakai Model Efek Tetap. Jika uji Chow dan Hausman memakai model yang sama, maka pengujian ketiga, uji Pengganda Lagrange, tidak diperlukan. Berdasarkan hasil tersebut, Model Efek Tetap tampaknya paling cocok untuk analisis regresi data panel studi ini.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji kenormalan dapat dipakai untuk mengetahui apakah nilai residual yang keluar dari regresi mengikuti distribusi normal.



Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 4.1 Uji Normalitas

Gambar 4.1 menandakan yaitu hasil uji kenormalan adalah 0,099815 untuk statistik Jarque-Bera serta angka probabilitas 0,951317 untuk keseluruhan set. Karena besarnya probabilitas ( $0,951317 > 0,05$ ) lebih besar dari  $\alpha$ , kita menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Sebab itu, hasilnya mengikuti distribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dipakai untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan antara variable independen.

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.588407	-0.075644	0.094526
X2	-0.588407	1.000000	0.106422	-0.103433
X3	-0.075644	0.106422	1.000000	0.126897
X4	0.094526	-0.103433	0.126897	1.000000

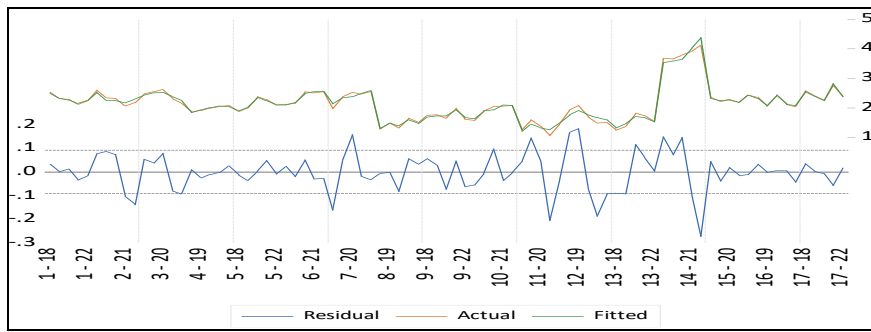
Sumber: Data diolah, 2024

Berlandaskan tabel 4.3 di atas dapat diketahui hasil uji multikolinearitas, nilai korelasi antara X1 (PAD) dan X2 (DP) sejumlah -0.588407. Nilai korelasi antara X1 (PAD) dan X3 (BM) sejumlah -0.075644. Nilai korelasi antara X1 (PAD) dan X4 (TK) sejumlah 0.094526. Nilai korelasi antara X2 (DP) dan X3 (BM) sejumlah 0.106422. Nilai korelasi X2 (DP) dan X4 (TK) sejumlah -0.103433, serta nilai korelasi antara X3 (BM) dan X4 (TK) sejumlah 0.126897. Diketahui bahwa semua nilai dari data yang diperoleh tersebut  $< 0,85$ , artinya berkesimpulan yaitu tidak terjadi masalah multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain.





Sumber: Data diolah, 2024

**Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas menandakan hasil uji heterokedastisitas dengan grafik residual yang tidak melewati batas (500 dan -500), artinya tidak terjadi heterokedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variable independen kepada satu variable dependen.

**Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient
C	2.032964
X1	0.097109
X2	-0.008907
X3	-0.003735
X4	0.001108

Sumber: Data diolah, 2024

Berlandaskan tabel 4.4 pada halaman sebelumnya hasil regresi linear berganda dapat dibentuk suatu persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2.032964 + 0.097109 X1 - 0.008907 X2 - 0.003735 X3 + 0.001108 X4 + e$$

Konstanta memiliki nilai sejumlah 2.032964. Jadi, bahkan jika kita mengasumsikan variable independen konstan, variable dependen akan mempertahankan nilainya sejumlah 2,032964. Kinerja keuangan akan meningkat sejumlah 0,097109 jika PAD tumbuh, dengan asumsi semua variable independen lainnya tetap konstan, menurut koefisien regresi sejumlah 0,097109 untuk variable X1. Koefisien regresi sejumlah -0,008907 untuk variable dana perimbangan (X2) menandakan arah negatif. Kinerja keuangan akan menurun sejumlah -0,008907 saat dana perimbangan naik, dengan asumsi semua faktor independen lainnya tetap konstan. Dengan asumsi semua variable independen lainnya tetap konstan, koefisien regresi sejumlah -0,003735 untuk variable belanja modal (X3) variable tersebut menandakan yaitu kinerja keuangan akan menurun seiring dengan peningkatan belanja modal. Dengan asumsi semua variable independen lainnya tetap konstan, kinerja keuangan meningkat sebanding dengan pertumbuhan tingkat kesejahteraan (X4), seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sejumlah 0,001108.

**Uji t**

Uji t dilaksanakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen kepada variable dependen secara parsial.

**Tabel 4.5 Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.032964	0.282896	7.186253	0.0000
X1	0.097109	0.009231	10.52042	0.0000
X2	-0.008907	0.003057	-2.914150	0.0049
X3	-0.003735	0.002672	-1.397793	0.1670
X4	0.001108	0.000453	2.448641	0.0171

Sumber: Data diolah, 2024

Data yang diolah saat 2024 merupakan sumbernya.

Tabel t dapat ditemukan dalam tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dan dengan 80 derajat kebebasan. Nilai tabel t adalah 1,990063. Berlandaskan tabel 4.5, kita dapat melihat bahwa variable PAD memiliki nilai t hitung sejumlah 10,52042 > t tabel 1,990063, dan tingkat signifikansinya ialah 0,0000 < 0,05. Jadi, dapat dikatakan yaitu Ha diakui, yang menandakan yaitu pendapatan awal yang diciptakan di daerah tersebut memengaruhi yang substansial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kami memperoleh tingkat signifikansi sejumlah 0,0049 < 0,05 serta angka t sejumlah -2,914150 > t tabel 1,990063 untuk variable dana perimbangan. Bahwa dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah menandakan yaitu Ha diterima. Variable yang terkait dengan belanja modal menghasilkan nilai t sejumlah -1,397793 < t tabel 1,990063 dan tingkat signifikansi 0,1670 > 0,05. Dengan demikian, Ha ditolak, yang menandakan yaitu belanja modal tidak terkait dan tidak berdampak signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### Uji f

Uji f dipakai untuk mengetahui apakah variable bebas (independen) secara bersama-sama berdampak terhadap variable terikat (dependen).

**Tabel 4.6 Uji f**

F-statistic	162.0773
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2024

Berlandaskan tabel 4.6 di atas diketahui nilai f hitung sejumlah 162.0773. Untuk menentukan f tabel, dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0.05 dengan df 1 (jumlah bebas) = 4, dan df 2 (n-k), dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variable. Hasil yang diperoleh untuk f tabel sejumlah 2.485885. Hasil yang diperoleh dari f hitung 162.0773 > f tabel 2.485885 dan tingkat signifikansi 0.000000 < 0.005. Berkesimpulan yaitu Ha diterima artinya PAD, dana perimbangan, belanja modal dan tingkat kemakmuran dengan bersimultan berdampak signifikan kepada kinerja keuangan.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai t sejumlah 2,448641 > 1,990063 dan tingkat signifikansi 0,0171 < 0,05 terlihat pada variable tingkat kemakmuran. Jadi, dapat dikatakan yaitu Ha diterima, yang berarti bahwa tingkat kekayaan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah bersignifikan. Berdasarkan hasil penelitian, variable PAD signifikan secara statistik dengan nilai t hitung sejumlah 10,52042 > t tabel sejumlah 1,990063 dan taraf signifikansi 0,0000. Sebab PAD secara parsial berdampak signifikan kepada kinerja keuangan pemerintah daerah, maka berkesimpulan yaitu H1 diterima. Perubahan PAD di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagaimana yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Hasil penelitian serupa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Nauw dan Riharjo, 2021), serta pendapatan asli daerah juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dibuktikan dalam penelitian (Putri dan Yuniarta, 2023). Pendapat yang sama bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah (Purwasih, 2020). Dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik, maka potensi kemandirian daerah dapat digali dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan daerah, sehingga akan meningkatkan PAD yang pada akhirnya akan

meningkatkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Dengan meningkatnya PAD, maka ketergantungan daerah terhadap pembiayaan pemerintah pusat akan berkurang. Teori keagenan menyatakan yaitu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya, dengan masyarakat sebagai agen utama. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menandakan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab di samping memenuhi komitmennya. Anggaran pemerintah daerah akan tampak lebih baik setelah ini. Namun, kesimpulan ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya bahwa pendapatan daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah (Ratnasari dan Meirini, 2022). Perihal ini karena pemerintah daerah masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat karena tidak memiliki independensi dalam pengelolaan keuangan.

### **Pengaruh Dana Perimbangan kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada studi ini diperoleh nilai  $t$  hitung sejumlah  $-2,914150 > t$  tabel sejumlah  $1,990063$  dan tingkat signifikansi sejumlah  $0,0049$  untuk variable dana perimbangan. Berdasarkan nilai  $t$  hitung negatif untuk dana perimbangan, maka berkesimpulan yaitu dana perimbangan relatif cukup besar mempengaruhi kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, H2 dapat diterima. Perihal ini sejalan dengan temuan bahwa dana perimbangan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Andaresta dan Aswar, 2021) dan sama pendapat bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Prastiwi dan Aji (2020). Hal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah mengalami situasi keuangan yang kurang ideal ketika sebagian besar pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. Perihal ini membatasi independensi mereka karena mereka tidak diperbolehkan untuk memakai dana tersebut secara bebas. Untuk membantu membayar pengeluaran tambahan di tingkat daerah, pembayaran perimbangan juga dikirim ke tingkat daerah. Jika pengeluaran daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, akan terjadi defisit. Karena kekurangan pengeluaran daerah ini, pemerintah federal menyediakan dana perimbangan untuk pemerintah negara bagian dan kota. Dana perimbangan federal dikirim ke negara bagian dan kotamadya dengan tarif yang proporsional dengan tingkat ketergantungan negara bagian dan kotamadya tersebut pada pendanaan federal untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga kinerja anggaran pemerintah daerah berkurang. Akibatnya, teori keagenan keseimbangan pasar mendapat dukungan. Namun, membayar penuh dapat meningkatkan kesejahteraan dan layanan publik berkualitas tinggi lainnya. Tidak ada cara untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan bersignifikan dengan sedikitnya jumlah uang yang dialokasikan untuk setiap daerah. Pemerintah pusat juga berperan signifikan dalam dukungan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah dalam kapasitasnya sebagai agen. Meskipun demikian, temuan ini berkorelasi negatif dengan hasil dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Nauw dan Riharjo, 2021) yang menandakan yaitu penyeimbangan keuangan tidak memengaruhi kinerja keuangan.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Variable belanja modal ditemukan memiliki  $t$  hitung  $-1,397793 < t$  tabel  $1,990063$  dan tingkat signifikansi  $0,1670$ , menurut hasil penelitian. Berkesimpulan yaitu H3 tidak terdukung, yang menandakan yaitu belanja modal tidak memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan bersignifikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Pendapat bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyatakan yaitu hasil ini masuk akal berdasarkan penelitian (Ati, Baidlowi, Ainiyah, dan Ilmiddaviq, 2023) dan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Putri dan Yuniarta, 2023). Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas dalam rangka memberikan layanan publik yang memadai, sesuai dengan teori keagenan. Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan daerah belum sepenuhnya diperhitungkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal penggunaan atau pengeluaran belanja modal. Belanja modal jika dilihat sebagai kegiatan investasi dapat dipandang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sumber daya keuangan dalam jangka panjang oleh pemerintah daerah. Jika pernyataan ini benar, maka program belanja modal pemerintah saat ini akan menghasilkan dana di masa mendatang, yang memungkinkan dana tersebut untuk menopang pendapatan daerah di masa mendatang. Namun, penelitian menandakan yaitu belanja modal mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah (Lathifa dan Haryanto, 2020) dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Nauw dan Riharjo, 2021), sehingga hasil ini bertolak belakang dengan hal tersebut.

### **Pengaruh Tingkat Kemakmuran kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian menandakan yaitu variable tingkat kesejahteraan signifikan secara statistik ( $p=0,0171$ ) dengan t-hitung 2,448641 > t-tabel 1,990063. Dengan asumsi H4 benar, maka berkesimpulan yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan sedikit banyak (tetapi tidak sepenuhnya) dipengaruhi oleh tingkat kekayaan. PAD yang lebih besar dikaitkan dengan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dan layanan publik yang lebih baik, menurut penelitian kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Aulia dan Rahmawaty, 2020) dan kemakmuran juga memiliki pengaruh pada kinerja keuangan (Cristian Manoppo et al., 2023). Layanan publik berstandar tinggi karena pemerintah daerah telah meningkatkan kinerja keuangannya. Pemerintah daerah, sebagai agen, seharusnya membantu setiap orang mencapai potensi penuhnya sehingga daerah tersebut dapat memiliki pendapatan asli yang tinggi dan karenanya lebih banyak kekayaan, menurut teori keagenan. Jika PAD tinggi, itu dapat berarti bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan segala daya untuk mencari aliran uang tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah tersebut. Contoh pengelolaan keuangan yang baik adalah pemerintah daerah yang membanggakan jumlah uang yang diperolehnya dan bagaimana ia memanfaatkan uang itu dengan baik. Bertolak belakang, hasil kemakmuran tidak berpengaruh (Kusumawardani, 2020). Sebab susahnya menemukan pengukuran yang ideal, karena kemakmuran bersifat subjektif.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Tingkat Kemakmuran kepada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji F menandakan nilai ambang batas signifikansi sejumlah  $0,000000 < 0,005$ , dan F hitung sejumlah  $162,0773 > F$  tabel 2,485885. Kesimpulannya, kita menerima H5 yang menyatakan yaitu Tingkat Kesejahteraan, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dengan bersimultan memengaruhi yang cukup besar terhadap Kinerja Keuangan. Dengan nilai R Square ( $R^2$ ) sejumlah 0,9745, belanja modal, dana perimbangan, pendapatan daerah, dan tingkat kesejahteraan dengan bersimultan memengaruhi sejumlah 97,4 persen kepada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dua setengah persen berasal dari variable yang tidak termasuk dalam model penelitian.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan yang sama: pendapatan daerah memengaruhi yang cukup besar terhadap kesehatan fiskal pemerintah daerah. Perihal ini menandakan yaitu apabila PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan meningkat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat. Keberhasilan anggaran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh dana perimbangan. Apabila dana perimbangan meningkat, kinerja keuangan akan menurun, dan apabila dana perimbangan menurun, kinerja keuangan akan membaik. Selain itu, perihal ini menandakan yaitu apabila pemerintah daerah terlalu bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat, maka akan terjadi otonomi daerah yang besar. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terpengaruh oleh belanja modal. Tingkat kekayaan sangat mempengaruhi kesejahteraan keuangan pemerintah daerah. Perihal ini membuktikan yaitu pendapatan yang lebih tinggi berkaitan dengan daerah yang lebih sejahtera dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Meningkatnya standar kualitas pelayanan publik akan berdampak positif terhadap laba bersih pemerintah daerah. Tingkat keberhasilan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti PAD, anggaran perimbangan, belanja modal, dan tingkat kemakmuran. Perihal ini menandakan yaitu apabila pendapatan daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kemakmuran meningkat, maka kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat ditingkatkan. Di masa mendatang, peneliti ingin memasukkan variable yang lebih luas yang dapat memengaruhi keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang. Maka dapat melihat perbandingannya jika Anda memilih atau menambahkan provinsi tambahan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahlillah, R. W., Sari, K. R., & Oktarida, A. (2022). Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 52-62.

- Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 1614-1624.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ermitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60-80.
- Ati, C. S., Baidlowi, I., Ainiyah, N., & Ilmiddaviq, M. B. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018–2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 110-118.
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584-598.
- Ayinde, Kayode, John Kuranga, dan Adewale F. Lukman. 2015. Modeling Nigerian Government Expenditure, Revenue and Economic Growth: Co-Integration, Error Correction Mechanism and Combined Estimators Analysis Approach. *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 5, No. 6, h. 858–867.
- Budianto, B., & Alexander, S. W. (2021). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- cristian Manoppo, D., Winerungan, R. R., & Tanor, L. A. (2023). Pengaruh Tingkat Kemakmuran Daerah dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 428-437.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572-2580.
- Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/711>
- Kusumawardani, M. (2020). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting analysis journal*, 1(1), 27-35.
- Lathifa, H., & Haryanto, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Marizka R. 2013. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di sumatra barat (tahun 2006-2011). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 3
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 5(2), 390-399.
- Millenia, N. A. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 786-803.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 64-77.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89-105.
- Purwasih. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah” Kabupaten/Kota DIY Tahun 2011—2016). *Universitas PGRI Yogyakarta*.

- Putri, N. P. A. S., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(01), 133-147.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1189.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Siagian, S. P. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86-97.